

**Sosialisasi Inovasi Desa Digital Dalam Menunjang
Pelayanan Publik di Desa Betalemba
Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso**

***Socialization of Digital Village Innovation to Support
Public Services in Betalemba Village
South Coast Poso District Poso Regency***

¹Karmila Akib, ¹Nur Afriyani Putri, ¹Eka Wahyuningsih

¹Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,
Universitas Sintuwu Maroso, Poso

Korespondensi: K. Akib, karmilaakib@yahoo.com

Naskah Diterima: 15 Maret 2024. Disetujui: 16 Agustus 2024. Disetujui Publikasi: 30 April 2025

Abstract. Digital government is the latest concept in the implementation of public services that emphasizes the use of information technology to improve the effectiveness of government management and provide fast, easy, and accessible services to the public. Rapid technological advances require all sectors to adapt to the use of internet-based technology. One sector that feels the positive impact of digital government is the village. Through the Digital Village program, information technology is integrated into public services, economic activities, and various other aspects. However, conditions in the village remain difficult due to various challenges, such as low quality of human resources, limited access to information, and lack of internet networks. This community service activity aims to provide understanding and improve the knowledge and skills of the apparatus of Betalemba Village, Poso Pesisir Selatan District, Poso Regency regarding digital village innovation, especially in supporting public services in the village. It is hoped that this innovation can make public services more efficient and easily accessible, so that people no longer need to go to the village office to take care of administration. The background of this activity is the continued use of manual systems in public services in Betalemba Village. This activity was carried out through socialization using a lecture and discussion approach. The results of the activity showed that participants could understand the concept of digital villages as a tool to improve the quality of services to the community.

Keywords: Public services, Digital villages, Innovation.

Abstrak. Pemerintahan digital merupakan konsep terbaru dalam penyelenggaraan layanan publik yang menekankan pemanfaatan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintah serta memberikan layanan yang cepat, mudah, dan dapat diakses oleh masyarakat. Kemajuan teknologi yang sangat pesat mengharuskan seluruh sektor untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi berbasis internet. Salah satu sektor yang merasakan dampak positif dari pemerintahan digital adalah desa. Melalui program Desa Digital, teknologi informasi diintegrasikan ke dalam layanan publik, kegiatan ekonomi, dan berbagai aspek lainnya. Namun, kondisi di desa tetap sulit karena adanya berbagai tantangan, seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, akses informasi yang terbatas, dan kurangnya jaringan internet. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pemahaman serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan dari aparatur Desa Betalemba, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso mengenai inovasi desa digital, terutama dalam mendukung layanan publik di desa. Diharapkan bahwa inovasi ini dapat membuat layanan publik lebih efisien dan mudah diakses, sehingga masyarakat tidak perlu lagi pergi ke kantor desa untuk mengurus

administrasi. Latar belakang dari kegiatan ini adalah masih digunakannya sistem manual dalam layanan publik di Desa Betalemba. Kegiatan ini dilaksanakan melalui sosialisasi yang menggunakan pendekatan ceramah dan diskusi. Hasil dari kegiatan menunjukkan bahwa peserta dapat memahami konsep desa digital sebagai alat untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Kata Kunci: *Pelayanan publik, Desa digital, Inovasi.*

Pendahuluan

Pelayanan kepada masyarakat sudah menjadi tujuan utama dalam penyelenggaraan administrasi publik. Di Indonesia penyelenggaraan pelayanan publik menjadi isu kebijakan yang semakin strategis karena perbaikan pelayanan publik di negara ini cenderung berjalan di tempat, sedangkan dampaknya sangat luas karena menyentuh seluruh ruang-ruang kepublikan baik dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, budaya dan lain-lain

Pelayanan publik merupakan indikator utama untuk menilai apakah fungsi pemerintahan telah terlaksana secara penuh dan apakah kinerja pemerintahan telah sesuai dengan kaidah sistem birokrasi. Sebagai elemen kunci pemerintahan yang baik, pelayanan publik dihargai oleh semua pihak yang terlibat dalam prinsip pemerintahan yang baik (Lailiyah, 2022). Sinambela dkk. (2011) mendefinisikan pelayanan publik adalah pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Selama ini, pelayanan publik di Indonesia secara empiris masih ditandai dengan hal-hal seperti berbelit-belit, lambat, mahal, ketidakpastian dan melelahkan. Terdapat banyak permasalahan dalam sistem birokrasi pelayanan publik pemerintah, seperti prosedur pelayanan yang panjang, waktu dan harga yang tidak menentu, sehingga menyebabkan masyarakat sulit menikmati pelayanan yang layak (Lailiyah, 2022). Keadaan ini mengakibatkan masyarakat lebih banyak mencari cara lain agar mendapatkan pelayanan secara cepat dengan memberikan biaya tambahan.

Untuk mengatasi hal ini, yang perlu dilakukan adalah upaya peningkatan kualitas pelayanan publik berkelanjutan karena pelayanan publik merupakan fungsi utama Pemerintah. Penerapan *e-Government* dianggap paling tepat untuk kondisi pelayanan publik saat ini (Mohi & Botutihe, 2020). Perkembangan teknologi informasi telah menghadirkan layanan komputasi yang memungkinkan penyimpanan data secara praktis melalui perangkat yang mampu menampung data digital dalam kapasitas besar. Kemajuan di bidang ini berlangsung sangat cepat, dengan inovasi-inovasi baru yang muncul hampir setiap hari, bukan lagi dalam rentang tahunan (Fakhrurrazi dkk., 2022). Saat ini, masyarakat global sangat membutuhkan teknologi informasi dan komunikasi. Keinginan untuk mendapatkan informasi dengan cepat bukan hanya milik orang yang tinggal di kota, tetapi juga telah menyebar ke daerah pedesaan, termasuk dalam sektor publik dan swasta (Amiruddin, & Ali, 2020).

Pemerintah memperkenalkan pembangunan berbasis teknologi melalui pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dikenal dengan istilah *e-Government*. Implementasi *e-Government* ini didasarkan pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 mengenai Kebijakan dan Strategi Nasional dalam Pengembangan *E-Government* di Indonesia. *E-Government* adalah usaha untuk mengembangkan pemerintahan yang menggunakan teknologi elektronik agar pelayanan publik menjadi lebih baik. Pemerintahan Elektronik (*e-Gov*) adalah usaha untuk mengembangkan sistem pemerintahan yang berbasis teknologi agar kualitas pelayanan publik meningkat. *E-Government* merupakan cara menggunakan teknologi informasi untuk membantu dalam pengelolaan sistem pemerintahan yang lebih efisien.

Implementasi e-Government dalam pengaturan negara dan pelayanan publik membutuhkan pemanfaatan teknologi informasi serta komunikasi dan tenaga kerja yang kompeten dalam pengelolaannya. Dengan cara ini, layanan dapat diakses di mana saja dan kapan saja. Pelaksanaan pemerintahan dilakukan secara digital dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari penerapan e-Government.

Teknologi informasi kini telah menjadi kebutuhan mendasar bagi seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya di wilayah perkotaan, tetapi juga di pedesaan. Baik instansi pemerintah maupun sektor swasta memerlukan pemanfaatan teknologi ini, mendorong pergeseran dari sistem pelayanan manual menuju layanan berbasis digital. Jika sebelumnya instansi pemerintah masih bergantung pada dokumen fisik, kini telah bertransformasi ke arah pelayanan elektronik (Amiruddin & Ali, 2020).

Salah satu langkah yang diambil oleh pemerintah adalah menerapkan program digitalisasi desa (Lailiyah, 2022). Dengan digitalisasi desa, teknologi informasi dan komunikasi dapat digunakan dan digabungkan untuk meningkatkan pelayanan publik serta mengurangi kesenjangan informasi yang sering terjadi di desa (Rahmawati dkk., 2022).

Fokus dari digitalisasi adalah pada pengembangan keterampilan digital yang dimulai dari penggunaan komputer, lalu berkembang menjadi pemakaian internet dan media sosial (Anggraini, 2023). Digitalisasi menjadi bagian penting sebagai upaya untuk mendorong pembangunan desa. Hal ini merupakan tuntutan zaman, persyaratan pengembangan, persyaratan situasional yang terus bergerak menuju suatu situasi disebut era digital. Digitalisasi adalah hal yang tak terelakkan. Dengan adanya teknologi informasi ini memudahkan masyarakat untuk mengakses pelayanan publik. Pemerintahan digital merupakan sebuah konsep baru dalam pelayanan publik yang mengedepankan penggunaan teknologi informasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah dan memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat. Melalui inisiatif digitalisasi desa, masyarakat kini merasakan dengan lebih nyata kebutuhan akan layanan berkualitas dari pemerintah desa yang juga menjadi lebih mudah diakses. Pengelolaan data yang lebih terarah dapat dimanfaatkan untuk menjalankan pemerintahan desa secara berkelanjutan tanpa batasan waktu (Lailiyah, 2022). Diharapkan, pemakaian teknologi informasi oleh warga desa dapat meningkatkan kinerja pegawai pemerintah desa dalam menciptakan layanan publik yang lebih baik, sehingga masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan yang mereka butuhkan (Kurniawan dkk., 2021). Dengan adanya program desa digital, terdapat perbaikan dalam layanan publik, dan masyarakat merasakan manfaat dari akses informasi yang lebih cepat di desa berkat adanya jaringan internet dan website desa. Selain itu, layanan posyandu juga lebih cepat tersebar berkat sistem informasi berbasis internet. Warga desa dapat mendapatkan informasi pendidikan, belajar materi pelajaran, serta berkomunikasi dengan guru dan orang lain (Tirayoh & Waworundeng, 2023).

Teknologi Informasi dan Komunikasi dapat berfungsi sebagai alat untuk memperbaiki administrasi di tingkat desa. Sebagaimana kita ketahui, administrasi desa sering kali memiliki berbagai kelemahan, termasuk proses pembaruan data. Data di tingkat desa seringkali tidak sesuai dengan data di tingkat kecamatan akibat perbedaan dalam cara pembaruan data di masing-masing tingkat, termasuk juga di tingkat kabupaten (Septiansyah dkk., 2023). Selain itu, minimnya pemahaman aparat pemerintah desa terhadap teknologi informasi turut menjadi faktor yang menyebabkan kurang optimalnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Hal ini pula yang terjadi pada Pemerintah Desa Betalemba Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso yang menjadi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Kepala Desa Betalemba, permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian ini adalah: 1).

Kegiatan pelayanan publik di Desa Betalemba saat ini masih dilakukan secara konvensional, dimana masyarakat harus datang ke kantor dan membutuhkan waktu yang lama; 2) rendahnya kompetensi SDM pada pemerintah desa khususnya tentang inovasi desa digital dengan memanfaatkan teknologi informasi; 3). pengembangan perangkat desa yang masih terbatas karena kendala teknis dan lain-lain; 4). akses informasi yang masih terbatas terutama berkaitan dengan sistem pelaksanaan program desa digital; dan 5). Keterbatasan jaringan internet.

Untuk itulah diperlukan kegiatan sosialisasi tentang inovasi desa digital dalam pelayanan publik yang bertujuan untuk memberikan pemahaman dan pengetahuan kepada perangkat Desa Betalemba Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso. Hal ini sejalan dengan pernyataan Fakhurrazi dkk., (2022) bahwa Penerapan inovasi desa digital dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi, sehingga pelayanan menjadi lebih efektif dan efisien. Keunggulan dari digitalisasi desa jauh lebih besar jika dibandingkan dengan kekurangannya. Banyak desa di Indonesia telah menerapkan teknologi informasi dan teknologi untuk mendukung pelayanan publik serta administrasi pemerintah desa. Contohnya termasuk Desa Dermaji di Kabupaten Banyumas, Desa Sepakung di Kabupaten Semarang, dan Desa Lamahu di Kabupaten Bone Bolango, serta banyak lainnya (Rahmawati dkk., 2022).

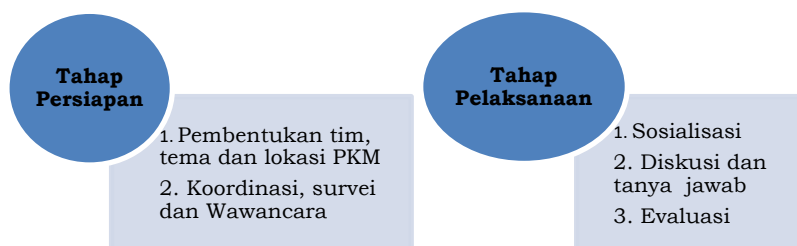
Kegiatan pengabdian bertujuan untuk memperbaiki pemahaman serta pengetahuan aparat di Desa Betalemba, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso. Ini diharapkan dapat meningkatkan kinerja mereka, terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat setempat.

Metode Pelaksanaan

Tempat dan Waktu. Kegiatan ini dilakukan di Kantor Desa Betalemba, yang terletak di Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso, Rabu, 6 Maret 2024.

Khalayak Sasaran. Sasaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah sembilan Aparatur Desa Betalemba yang berada di Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso. Mereka terdiri dari Kepala Urusan Keuangan, Kepala Urusan Umum, Kepala Urusan Perencanaan, Kepala Seksi Kesejahteraan, Kepala Seksi Pelayanan, Kepala Dusun, dan juga seorang operator desa. Penetapan peserta untuk sosialisasi ini dilakukan melalui musyawarah dengan Kepala Desa, dengan mempertimbangkan tugas dan tanggung jawab masing-masing perangkat desa.

Metode Pengabdian. Dalam kegiatan pengabdian ini, beberapa metode yang digunakan mencakup ceramah, diskusi, tanya jawab, dan evaluasi. Selama sosialisasi, pemateri membagikan materi mengenai inovasi desa digital yang kemudian dilanjutkan dengan contoh penerapan konsep desa digital. Sebelum kegiatan dimulai, peserta diminta untuk mengisi pre-test yang berisi beberapa pertanyaan. Setelah materi disampaikan, sesi diskusi dan tanya jawab diadakan untuk memberi kesempatan peserta bertanya. Kegiatan diakhiri dengan evaluasi di mana peserta mengisi post-test untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang inovasi desa digital. Metode dalam kegiatan ini dapat dilihat pada gambar 1.



Gambar 1. Metode pelaksanaan kegiatan

Indikator Keberhasilan. Indikator keberhasilan dalam kegiatan ini diukur dengan semakin meningkatnya pemahaman dan pengetahuan peserta kegiatan tentang inovasi desa digital. Kegiatan dikatakan berhasil jika peserta memahami materi sebesar 80 %.

Metode Evaluasi. Untuk mengukur keberhasilan kegiatan pengabdian ini, dilakukan analisis terhadap kemampuan peserta dengan membandingkan hasil pre-test dan post-test terkait inovasi desa digital. Evaluasi dalam kegiatan ini mencakup pemberian tes sebelum dan setelah materi disampaikan. Pertama, peserta sosialisasi mengikuti pre-test yang berisi pertanyaan tentang inovasi desa digital. Setelah materi diberikan, peserta mengikuti post-test untuk mengukur pemahaman mereka terhadap materi yang telah diajarkan. Penilaian hasil tes dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengelompokkan data untuk menyusun jawaban sesuai dengan pertanyaan tes;
2. Menyusun tabel data berdasarkan kategori yang dibuat untuk menunjukkan frekuensi dan kecenderungan dari setiap jawaban sesuai pertanyaan dan jumlah sampel;
3. Menghitung frekuensi jawaban untuk memberikan informasi mengenai kecenderungan pilihan peserta;
4. Menghitung persentase jawaban untuk mengetahui besaran persentase masing-masing jawaban dari pertanyaan agar data yang ada bisa dianalisis dan disimpulkan.

Hasil dan Pembahasan

A. Tahap Persiapan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dimulai dengan tahap persiapan yaitu berupa pembentukan tim, penentuan tema dan lokasi kegiatan. Penentuan tema dan lokasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini berdasarkan identifikasi masalah di lokasi sasaran. Survei lapangan dilakukan oleh Tim PKM ini pada tanggal 6 Februari 2024 ke Desa Betalemba Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso. Setelah melakukan survei dan identifikasi masalah, maka tim pengabdian kepada masyarakat menentukan lokasi sasaran yaitu Desa Betalemba Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso dengan tema kegiatan tentang inovasi desa digital dalam pelayanan publik.

Selanjutnya, untuk urusan administrasi, tim pelaksana bertugas untuk menyiapkan alat-alat kegiatan yang meliputi izin lokasi, bahan pelatihan, pemilihan narasumber, serta melaksanakan koordinasi yang diperlukan. Koordinasi tersebut dilakukan dengan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sintuwu Maroso, bersama Pemerintah Desa Betalemba dari Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso yang menjadi target kegiatan ini.

B. Tahap Pelaksanaan Kegiatan

1) Kegiatan Sosialisasi Inovasi Desa Digital dalam Menunjang Pelayanan Publik di Desa

Perkembangan dalam teknologi komunikasi dan informasi menunjukkan dampak yang sangat besar dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu contohnya terjadi di sektor pemerintahan, di mana penggunaan teknologi dalam pelayanan publik bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, mempermudah akses, dan meningkatkan kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat oleh sektor publik.

Oleh sebab itu, sosialisasi ini diselenggarakan untuk memberikan pengetahuan serta pemahaman kepada perangkat desa mengenai inovasi dalam layanan publik.

Ini sangat penting, mengingat kita hidup di era digital saat ini, di mana masyarakat semakin mengharapkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan transparan dalam penyampaian informasi.

Kegiatan ini dimulai dengan pembentukan tim pengabdian kepada masyarakat yang terdiri dari dosen dan mahasiswa. Kegiatan tersebut berlangsung di Kantor Desa Betalemba, Kecamatan Poso Pesisir Selatan, Kabupaten Poso pada hari Rabu, 6 Maret 2024. Peserta dari kegiatan ini berjumlah sembilan orang, termasuk perangkat desa, staf, dan kepala dusun.

Ibu Karmila Akib, S. S., M. Si, seorang dosen di Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sintuwu Maroso Poso, berperan sebagai narasumber dalam kegiatan ini. Materi yang disampaikan mencakup Inovasi Desa Digital dan contoh penggunaan platform digital dalam pelayanan publik.

Dalam materi Inovasi Desa Digital, para peserta diberikan pengetahuan tentang inovasi desa digital, tujuan serta manfaatnya. Selanjutnya peserta juga diberikan gambaran penerapan bentuk inovasi berbasis digital yang dikembangkan di desa seperti Sistem Informasi Desa, *E-Commerce* local, Aplikasi Pertanian, Pendidikan Online, Sistem Pengolahan Limbah, Jaringan Internet Desa, Layanan Kesehatan Jarak Jauh, Sistem Keamanan Desa, Sistem Pengelolaan Keuangan Desa dan Program Pengembangan Desa Berbasis Data.



Gambar 2. Materi kegiatan



Gambar 3. Penyampaian materi kegiatan

Untuk mengatasi permasalahan mitra terkait pelaksanaan pelayanan publik yang masih konvensional dimana masyarakat datang berurusan di kantor dan membutuhkan waktu lama, kurangnya pengetahuan tentang inovasi desa digital karena akses informasi yang masih terbatas dan kurangnya perangkat desa mengikuti berbagai kegiatan untuk pengembangan pengetahuan, tim pengabdian

kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi ini mengenalkan salah satu bentuk inovasi berbasis digital yaitu system informasi desa dengan memanfaatkan platform media sosial *WhatsApp*.

Pengenalan aplikasi *Whatsapp* ini dapat digunakan sebagai sistem informasi layanan pemerintah desa. Tim pengabdian kepada masyarakat memberikan motivasi kepada Pemerintah Desa Betalemba untuk memanfaatkan aplikasi media sosial *WhatsApp* ini dalam pelayanan publik karena aplikasi ini mudah diakses oleh masyarakat. Hal ini juga sebagai salah satu langkah untuk memberikan pelayanan yang efektif dan efisien. Saat ini, berbagai kalangan, termasuk remaja, orang dewasa, dan orang tua, menggunakan *WhatsApp* karena kemudahan serta keuntungan yang ditawarkannya. Penggunaan *WhatsApp* tidak terbatas pada kelompok sosial ekonomi tertentu; semua lapisan masyarakat, mulai dari rendah, menengah, hingga tinggi, memanfaatkannya. Melalui layanan via *WhatsApp*, masyarakat dapat mengurus administrasi tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Dapat dilakukan dari rumah dan menghubungi admin desa terkait keperluannya dengan menyertakan dokumen-dokumen persyaratan yang diwajibkan. Selain untuk berkomunikasi dan mengirim pesan, aplikasi ini kini juga digunakan untuk keperluan pekerjaan (Rahmansari, 2017).

Sebelum pemberian materi oleh narasumber, peserta diberikan pre-test berupa pertanyaan yang harus dijawab terkait pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Setelah materi diberikan para peserta kemudian diberikan post-test. Pemberian test sebelum dan setelah materi ini bertujuan untuk mengukur pemahaman dan pengetahuan peserta terkait materi sosialisasi.

2) Kegiatan Diskusi

Setelah pemberian materi, kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dengan para peserta. Pada sesi diskusi ini, para peserta menyampaikan bahwa dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kantor Desa Betalemba masih dilakukan secara manual. Penggunaan aplikasi untuk penyelenggaraan pemerintahan desa pernah ada namun pelaksanaannya tidak berlangsung lama. Para peserta juga menyampaikan keluhan serta permasalahan yang dihadapi yaitu masih kurangnya pengetahuan mereka tentang inovasi desa digital karena akses informasi yang masih terbatas dan kurangnya perangkat desa mengikuti berbagai kegiatan untuk pengembangan pengetahuan.

Dalam sesi diskusi, para peserta menunjukkan ketertarikan pada penerapan Sistem Informasi Layanan Berbasis Aplikasi *WhatsApp*. Hal ini disebabkan oleh kemudahan penggunaan aplikasi ini, yang hampir semua orang gunakan, serta ketersediaannya di smartphone yang dimiliki banyak orang. Setelah diskusi selesai, kegiatan berlanjut dengan pemberian post-test kepada peserta.

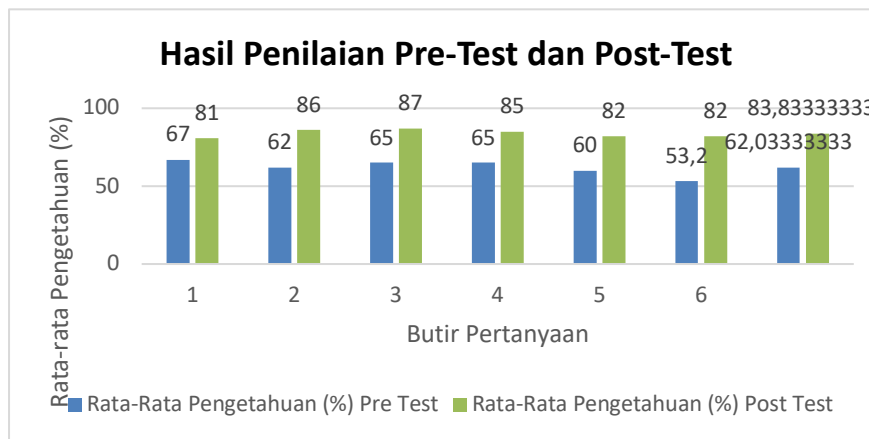
3) Evaluasi Kegiatan

Tahap evaluasi dilakukan dengan menilai sejauh mana pemahaman peserta terhadap materi yang telah disampaikan, melalui pelaksanaan pre-test dan post-test. Hasil tes sebelum dan setelah pemberian materi disampaikan kepada para peserta dengan tujuan agar mereka mengetahui kemampuannya setelah mengikuti kegiatan ini. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, para peserta mendapatkan pengetahuan dan informasi tentang inovasi desa digital dan bentuk-bentuk inovasi berbasis digital yang dapat dikembangkan di desa. Hasil evaluasi telah memenuhi indikator keberhasilan dimana terjadi peningkatan pemahaman peserta yang dilihat dari skor pre-test 62.03 menjadi 83.8 pada post-test.

C. Keberhasilan Kegiatan

Keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini terlihat berdasarkan indikator keberhasilan yang telah ditetapkan bahwa adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan semua peserta tentang inovasi desa digital sebesar

80%. Dimana adanya peningkatan pemahaman dan pengetahuan para peserta tentang inovasi dalam pelayanan publik sebesar 81 %, pengetahuan tentang desa digital sebesar 86 % dan tujuan serta manfaat desa digital sebesar 87 %. Para peserta juga memahami tentang beberapa platform digital yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan publik sebesar 85% dan contoh platform digitalnya sebesar 82%. Para peserta juga memahami dan mengetahui bentuk-bentuk inovasi berbasis digital yang dapat dikembangkan di desa sebesar 82%. Pada pre-test nilai secara keseluruhan mencapai 62,03%. Sedangkan pada post-test secara keseluruhan nilai yang diperoleh mengalami peningkatan menjadi 83,8 %.



Gambar 4. Hasil evaluasi pre-test dan post-test

Kesimpulan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini telah berhasil memperluas wawasan dan pengetahuan aparatur Desa Betalemba mengenai inovasi desa digital dalam pelayanan publik. Melalui kegiatan ini, diharapkan Pemerintah Desa Betalemba dapat menerapkan inovasi digital dalam pelayanan publik dengan memanfaatkan platform digital untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan layanan yang cepat, mudah, dan transparan bagi masyarakat.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih ditujukan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sintuwu Maroso atas dukungan dana untuk kegiatan ini, serta kepada Pemerintah Desa Betalemba Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso sebagai mitra dalam acara ini yang telah memberikan izin. Juga, terima kasih kepada mahasiswa Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sintuwu Maroso yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan ini.

Referensi

- Amiruddin, A., & Ali, M. (2020). Pemanfaatan Teknologi Informasi Dan Komunikasi Dalam Mendukung E-Government Di Desa Tongke-Tongke Kecamatan Sinjai Timur Kabupaten Sinjai. *Al Qisthi: Jurnal Sosial Dan Politik*, 23–31. <https://doi.org/10.47030/aq.v10i1.78>
- Anggraini, D. (2023). Kualitas Layanan Publik Digitalisasi (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palembang). *Jurnal Administrative Reform*, 11(1), 62–76. <https://doi.org/10.30872/jar.v11i1.9821>
- Fakhrurrazi, F., Nurhafni, N., Ula, M., Setiawan, A. L., & Arpika, A. M. (2022). Pengembangan Desa Digital Dalam Pelayanan Publik Dan Kearsipan Berbasis

- Teknologi Informasi Di Gampong Reulet Timur. *RAMBIDEUN: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(3), 252–260.
<https://doi.org/10.51179/pkm.v5i3.1468>
- Kurniawan, R., Yonggi Puriza, M., Arkan, F. (2021). Membangun Sistem Informasi Desa untuk Pelayanan Publik Prima Berbasis Cloud Server di Desa Pagarawan Kabupaten Bangka. *Panrita Abdi-Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 5(2), 193–200.
<http://journal.unhas.ac.id/index.php/panritaabdi>
- Lailiyah, K. (2022). Digitalisasi Desa Sebagai Upaya Percepatan Pelayanan Publik Dalam Mewujudkan Good Governance. *RISTEK: Jurnal Riset, Inovasi Dan Teknologi Kabupaten Batang*, 6(2), 26–34.
<https://doi.org/10.55686/ristek.v6i2.112>
- Mohi, W. K., & Botutihe, N. (2020). Strategi Pemerintah Daerah dalam Meningkatkan Pelayanan pada Masyarakat Melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. *Publik (Jurnal Ilmu Administrasi)*, 9(2), 115.
<https://doi.org/10.31314/pjia.9.2.115-124.2020>
- Rahmansari, R. (2017). Penggunaan Aplikasi WhatsApp dalam Komunikasi Organisasi Pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik Dan Kebijakan Sosial*, 1(2), 77–90.
<https://doi.org/10.25139/jmnegara.v1i2.788>
- Rahmawati, F., Hariri, H., Saputra, B., & ... (2022). Pelatihan Manajemen Web Desa Sebagai Pusat Informasi dan Edukasi Masyarakat Lampung. *Jurnal Sinergi*, 3(September), 60–66.
<https://sinergi.lppm.unila.ac.id/index.php/jsi/article/view/39%0Ahttps://sinergi.lppm.unila.ac.id/index.php/jsi/article/download/39/41>
- Septiansyah, B., Wulandari, W., Gunawan, W., & Rochaeni, A. (2023). PERANAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI DALAM PELAYANAN PUBLIK DESA DI ERA DIGITAL 4.0 (Studi Kasus Pemerintah Desa Ciburial Kecamatan Cimenyan Kabupaten Bandung). *Jurnal Academia Praja*, 6(2), 261–271.
<https://doi.org/10.36859/jap.v6i2.1734>
- Sinambela, L.P., Rochadi, S., Ghazali, R., Setiabudi, A., Bima, D., & Syaifuddin. (2011) “Reformasi Pelayanan Publik Teori, Kebijakan, dan Implementasi”. Jakarta : PT Bumi Aksara. <https://inislite.uin-suska.ac.id/opac/detail-opac?id=19007>
- Tirayoh, G. A. T., & Waworundeng, W. (2023). Implementasi Kebijakan Program Desa Digital Dalam Upaya Kemajuan Pelayanan Publik Di Desa Kauditan I Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara. *Governance*, 3(1), 1–11.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/48052%0Ahttps://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/download/48052/42555>

Penulis:

Karmila Akib, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sintuwu Maroso, Poso. E-mail : karmilaakib@yahoo.com

Nur Afriyani Putri, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sintuwu Maroso, Poso. E-mail: nurafriyaniputri08@gmail.com

Eka Wahyuningsih, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sintuwu Maroso, Poso. E-mail: wahyuningsiheka056@gmail.com

Bagaimana men-sitasi artikel ini:

Akib, K., Putri, N.A., & Wahyuningsih, E. (2025). Sosialisasi Inovasi Desa Digital Dalam Menunjang Pelayanan Publik di Desa Betalemba Kecamatan Poso Pesisir Selatan Kabupaten Poso. *Jurnal Panrita Abdi*, 9(2), 457-465.